

PENGAWASAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR KALI WONOKROMO SURABAYA

(Studi tentang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya)

SKRIPSI



Oleh:
Gusti Sisilia Karen
0941010019

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2013

**PENGAWASAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR KALI
WONOKROMO SURABAYA**

(Studi tentang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya)

Di Susun Oleh :

Gusti Sisilia Karen
0941010019

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 18 April 2013

Menyetujui,

Pembimbing

Tim Penguji :

1.




Dr. Lukman Arif, MSi
NIP. 196411021994031001



Dr. Lukman Arif, MSi
NIP. 196411021994031001

2.



Dr. Ertien Rining N, MSi
NIP. 196801161994032001

3.



Drs. Pudjo Adi, M.Si
NIP. 19515101973031001

Mengetahui,

Dekan



Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 195507181983022001

**PENGAWASAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR KALI
WONOKROMO SURABAYA**
(Studi tentang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya)

Disusun Oleh:

Gusti Sisilia Karen
NPM. 0941010019

Telah disetujui untuk menyikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

Mengetahui,

DEKAN



Dra. Ec. H. Suparwati, M.Si
NIP. 195597181983022001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air Kali Wonokromo Surabaya”.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis masih banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak DR. Lukman Arif, MSi selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Hj. Suparwati, Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak DR. Lukman Arif, MSi, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas bimbingan dan didikannya selama ini.
4. Segenap pegawai yang bertugas di Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya atas kerjasamanya dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengadakan penelitian.
5. Kepada kedua Orang tua saya yang telah memberikan segala yang mereka bisa, baik berupa dukungan dan semangat.

6. Seseorang yang spesial, S. Putra Prasetia yang juga telah memberikan dukungan dan semangat pada saya dalam mengerjakan penelitian ini.
7. Semua teman – teman, Ima, Chany, dan lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, suwun yo rek.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Konsep Pengawasan	14
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pengawasan	18
2.2.3 Prinsip – Prinsip Pengawasan	21
2.2.4 Sifat – Sifat Pengawasan	22
2.2.5 Macam Pengawasan	24
2.2.6 Proses Pengawasan	28
2.2.7 Syarat – Syarat Pengawasan	30
2.2.8 Teknik - Teknik Pengawasan	31

2.2.9 Sasaran Pengawasan	33
2.2.10 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan.....	34
2.2.11 Pencemaran Air	34
2.3 Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	37
2.3.1 Maksud dan tujuan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	37
2.3.2 Ruang lingkup pengelolaan kualitas air	37
2.3.3 Sanksi Pidana	38
2.4 Kerangka Berfikir	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Fokus Penelitian	42
3.3 Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	45
3.4 Sumber dan Jenis Data	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Analisa Data	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.1 Sejarah Singkat Wajah Kali Surabaya	52
4.1.2 Sejarah Singkat dan Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	57

4.1.3 Visi dan Misi	61
4.1.4 Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup	62
4.1.5. Struktur Organisasi	73
4.1.6. Komposisi Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	74
4.2 Hasil Penelitian	77
4.2.1 Pengawasan Langsung	77
4.2.2 Pengawasan Tidak Langsung	85
4.3 Pembahasan	90
4.3.1 Pengawasan Langsung	90
4.3.2 Pengawasan Tidak Langsung	94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ABSTRAKSI

GUSTI SISILIA KAREN. PENGAWASAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR KALI WONOKROMO SURABAYA.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena masih banyaknya masyarakat dan instansi yang melanggar peraturan agar tidak membuang limbah ke dalam kali. Dari hasil pengamatan di lapangan, ternyata masih banyak pelanggar baik beberapa instansi perusahaan atau industri maupun masyarakat yang membuang limbah ke dalam sungai tanpa melihat efek yang terjadi pada jangka panjang dalam kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung melalui air. Maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pengawasan terhadap kualitas air di Kali Wonokromo oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Karena pengawasan merupakan salah satu cara untuk menjaga agar peraturan tetap berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat saling mengawasi agar mencegah terjadinya pelanggaran. Berdasarkan hal diatas, maka dibuatlah rumusan masalah penelitian “Bagaimanakah pengawasan pengendalian pencemaran air di Kali Wonokromo Surabaya oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya?”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian lima hal yaitu : pertama, pengawasan langsung : pemantauan usaha, memasuki tempat usaha, pemeriksaan peralatan, dan pemeriksaan instalasi. Kedua, pengawasan tidak langsung : meminta keterangan penanggungjawab usaha, dan membuat salinan dokumen. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan reduksi data, display data, instrument penelitian ini adalah pedoman wawancara, catatan di lapangan dan koneksi internet.

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah yang pertama pengawasan langsung, yang merupakan upaya untuk mengawasi dengan cara turun langsung ke lapangan, dan pengawasan dengan cara tersebut sejauh ini telah berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung, yang merupakan pengawasan dari jarak jauh, maka pengawasan ini dilakukan melalui tim pengawas yang bertugas untuk membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan dari perusahaan atau tersebut.

Kata kunci: Pengawasan, pengendalian, pencemaran air

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Perda Kota Surabaya No. 02 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran terjadi karena adanya zat, energi, makhluk hidup atau komponen lain dalam lingkungan, karena kegiatan manusia maupun proses alam, sehingga lingkungan tidak dapat atau kurang berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan merupakan perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan manusia yang disebabkan perubahan pola penggunaan materi dan energi, tingkatan radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia, dan jumlah organisme. Perbuatan ini dapat mempengaruhi manusia baik langsung atau tidak langsung melalui air, hasil pertanian, peternakan, benda-benda, perilaku dalam apresiasi di alam bebas.

Pencemaran lingkungan bisa menjadi masalah bila melihat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rencana Kerja Pemerintah telah menetapkan tujuh prioritas pembangunan nasional. Ketujuh prioritas tersebut adalah penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan; peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; revitalisasi pertanian dan pedesaan; peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik; rehabilitasi dan rekonstruksi. Melihat rencana kerja tersebut, isu lingkungan atau pembangunan lingkungan tidak masuk dalam prioritas pemerintah.

Lembaga dan kebijakan lingkungan yang ditetapkan belum menjadi solusi bagi pemecahan masalah lingkungan hidup di Indonesia karena tidak didukung dengan penegakan hukum sanksi yang belum sepenuhnya diberlakukan dengan tegas. Kenyataan ini dapat dilihat dengan tetap terjadinya illegal-logging, pencemaran limbah B3 (merkuri) yang dilakukan oleh pertambangan dan industri, masalah pengelolaan sampah, polusi udara yang tinggi di perkotaan, dan masalah destruksi lingkungan hidup lainnya yang diakibatkan oleh pembangunan yang egois dan mengabaikan daya dukung lingkungan. Tidak terkecuali di Kota Surabaya, kasus-kasus pencemaran lingkungan masih banyak yang menggantung.

Kota Surabaya dengan slogan “Bersih dan Hijau” memang jauh dari realitas. Minimnya ruang terbuka hijau dan polusi udara dan air merupakan pencemaran lingkungan yang utama. Hasil pemantauan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jatim menyebutkan, setidaknya sebanyak 3 dari 10 perusahaan di sepanjang Kali Surabaya dinilai belum maksimal mengelola lingkungan di sekitar kali. Ketiga perusahaan itu dipastikan akan sulit mengakses bantuan perbankan untuk modal usaha perusahaan.

Berdasarkan data perolehan proper perusahaan yang berlokasi sepanjang Kali Surabaya, tiga perusahaan yang memperoleh proper merah itu adalah PT Keramik Diamond, PT Miwon, dan PT Platinum Keramik.

"Predikat proper ini sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan, sebab hasil proper berpengaruh pada peminjaman kredit di bank," kata Kasubid Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, Ainul Huri, Kompas (26/12/2012).

Sementara tujuh perusahaan lainnya mendapatkan proper biru yang berarti perusahaan itu telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku. Ketujuh perusahaan itu adalah PT Wings Surya, PT Titani Alam Semesta, PT Surya Agung Kertas, PT Surabaya Mekabox, PT Adiprima Suraprinta, PT Timur Megah Steel, dan PT Suparma Tbk.

Ada lima peringkat warna dalam pemberian proper yang akan diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada perusahaan itu, yakni emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Proper emas yaitu perusahaan sudah dianggap dapat menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya berguna bagi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Kemudian warna hijau, dimana perusahaan dianggap telah menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan. Lalu ada warna merah yang mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, namun baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan. Dan terakhir atau paling parah adalah warna hitam, perusahaan tersebut dinilai belum melakukan upaya lingkungan yang berarti atau bahkan tidak melakukan upaya, serta berpotensi mencemari lingkungan.

Bagi perusahaan yang ingin mendapatkan perbaikan peringkat warna proper yang lebih baik, kata Ainul, membutuhkan waktu lama. "Dalam transisi itu, semua bisa terjadi, bahkan kondisi lingkungan bisa menjadi lebih buruk, karena faktor pendukungnya juga dari lingkungan eksternal, bukan hanya internal," jelasnya.

Banyak pabrik yang beroperasi di sepanjang Kali Surabaya tidak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) banyak juga pabrik yang hanya menggunakan bak kontrol untuk menampung limbah tanpa pengolahan lebih lanjut. Meskipun nantinya perusahaan itu terbukti mencemari Kali Surabaya, sanksi hukum yang diberikan tidak sebanding dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Surabaya, ketentuan pidana atas tindakan pencemaran air yaitu pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah. Betapa minimnya sanksi hukum atas suatu tindakan kejahatan lingkungan yang berdampak sangat buruk bagi seluruh organisme termasuk manusia yang menggunakan air Kali Surabaya untuk kelangsungan hidupnya.

Parahnya, berdasarkan data dari Perum Jasa Tirta I, saat ini kualitas air DPS (Daerah Pengairan Sungai) Kali Surabaya berada pada kategori C (dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan), tetapi air Kali Surabaya digunakan oleh enam instalasi pengolahan air (IPA) sebagai sumber air baku untuk air minum oleh PDAM Surabaya. Seharusnya air untuk bahan baku air minum adalah masuk dalam kategori B. Yang akan menjadi korban atas ketidaklayakan air Kali Surabaya tentu saja adalah para pelanggan air PDAM Kota Surabaya (Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 28 Th 2000: Penggolongan air menurut peruntukannya).

Menurut Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif ECOTON (Ecological Observation and Wetland Conservation), setidaknya ada empat faktor penyebab makin parahnya tingkat pencemaran di Kali Surabaya. Pertama, lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Instansi pemerintah dalam hal ini Bapedal Propinsi Jatim, Perum Jasa Tirta I, Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, Pemda Kotamadya Mojokerto, Pemda Kabupaten Gresik, dan Pemda Kabupaten Sidoarjo. Kedua, rendahnya kesadaran industriawan untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan badan air Kali Surabaya, dan menganggap Kali Surabaya adalah tempat pembuangan akhir. Ketiga, tidak jelasnya instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan badan air Kali Surabaya, sehingga instansi pemerintah yang terkait dengan kali sulit diharapkan mampu menangani masalah ini karena mereka merasa tidak bertanggung jawab atas pengelolaan Kali Surabaya. Keempat, lemahnya perangkat hukum yang mengatur pencemaran air di wilayah Jawa Timur. Tindakan pembuangan limbah yang mengakibatkan perubahan pada lingkungan hanya dikenai denda maksimal lima juta rupiah atau kurungan maksimal enam bulan, padahal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindakan pidana yang tergolong pada pencemaran lingkungan dapat dikenai denda sebesar-besarnya seratus juta rupiah atau sepuluh tahun kurungan penjara. Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan juga Pemerintah Kota Surabaya lebih menyukai memakai Perda-nya daripada UU Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebenarnya tidak hanya perusahaan yang terbukti membuang limbah B3 di Kali Surabaya. Setiap harinya sekitar tiga ratus tiga puluh ton limbah cair dibuang di Kali Surabaya, sebagian besar limbah berasal dari industri yang terletak disepanjang Kali Tengah (anak Kali Surabaya). Selain industri, sejumlah rumah sakit dan hotel di Surabaya pun turut menyumbangkan zat kimia yang mencemari Kali Surabaya. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran Kali Surabaya yang belum memiliki kamar mandi atau saluran pembuangan yang layak, juga menyumbang limbah domestik berupa tinja dan deterjen (Kompas: 2012).

Kali Wonokromo adalah merupakan salah satu anak Kali Mas dan merupakan Kali buatan pada zaman penjajahan Belanda yang mengalir ke arah timur di kota Surabaya. Kali Wonokromo terletak di sepanjang Jl. Jagir Wonokromo. Di Kali ini terdapat juga berbagai macam sumber daya, di antaranya ikan air tawar, yang terkenal salah satunya ialah Iwak Keting, ada juga udang. Setiap beberapa periode (beberapa bulan) sekali diadakan pembuangan endapan lumpur dari PDAM atau yang sering disebut warga sebagai "pengglontoran" ke aliran Kali Wonokromo, biasanya ini menyebabkan ikan, udang, serta beberapa jenis hewan air tawar lainnya mabuk, ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mendapat ikan tanpa bersusah payah, hanya dengan menggunakan jaring maka akan terjaring ikan-ikan yang mabuk tadi.

Di Kali Wonokromo juga terdapat Pintu Air peninggalan penjajah Belanda yang saat ini masih dipergunakan untuk pengaturan debit air Kali Mas, yaitu pecahan Kali Brantas di kota Surabaya untuk dibuang ke Kali Wonokromo. Letak pintu air tersebut tepat di sebelah Stasiun Kereta Api Wonokromo dan

PDAM Surabaya. Air dari Kali Wonokromo juga diolah menjadi Air PAM dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Surabaya.

Zaman dahulu, Kali Wonokromo berair jernih, sehingga banyak juga dimanfaatkan masyarakat untuk MCK, atau sekadar berenang. Namun sayang, akibat pencemaran air Kali Wonokromo berwarna keruh, dan saat ini Pemkot Surabaya telah memulai membersihkan Kali Wonokromo. Kawasan Kali Wonokromo di Kota Surabaya menunjukkan kemunduran kualitas air akibat limbah domestik mengingat sebagian besar penduduk mengandalkan air kali tersebut untuk sumber kebutuhan airnya disamping adanya penurunan kualitas lingkungan kali itu sendiri, selain itu pabrik – pabrik yang berada dekat dengan pinggir kali turut juga membuang limbahnya ke dalam kali (Sinar Harapan, 2002). Kualitas air kali merupakan hal yang sangat penting karena kali adalah sumber air utama yang digunakan untuk kebutuhan air minum, pertanian, perikanan, dan kepentingan industri. Kualitas air ini mengalami degradasi sebagai akibat beban pencemaran kali yang berasal dari aktivitas manusia seperti intensifikasi pertanian dan pengembangan kota.

Sudah dapat dipastikan bersama bahwa setiap Perda maupun peraturan yang ada selain untuk dijalankan dan ditaati juga memerlukan sebuah kegiatan yang berjalan mengiringi terlaksananya peraturan tersebut. Kegiatan tersebut merupakan sebuah pengawasan. Menurut Henry Fayol, pengawasan adalah mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari.

Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh dengan jalan mengadakan pemeriksaan yang ketat secara teratur. Berdasarkan hal tersebut, maka pengawasan tidaklah hanya dilakukan pada awal kegiatan saja, akan tetapi juga harus dilakukan seiring dengan berjalannya peraturan yang dikeluarkan untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan atau dapat menghasilkan sebuah pelanggaran.

Walaupun Perda ini telah diterapkan, tetapi peneliti masih saja menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa instansi atau masyarakat dalam pencemaran Kali tersebut. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap proses pelaksanaan Perda ini masih kurang maksimal. Di lingkungan pemerintah terdapat sejumlah aparat yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan. Kegiatan ini disebut sebagai pengawasan fungsional (Hadari Nawawi : 1995).

Pengawasan yang dilakukan dalam proses mengawal berjalannya Perda ini masih kurang maksimal karena masih ditemukan pelanggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan juga akan dapat mempengaruhi berjalannya serta berhasil atau tidaknya peraturan yang telah dikeluarkan tersebut. Hal ini yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih dalam tentang bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi terkait mengenai berjalannya Perda tersebut dengan judul “Pengawasan Kualitas Air Kali Wonokromo Surabaya”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Bagaimanakah Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air di Kali Wonokromo oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendiskripsikan pengawasan pengendalian pencemaran air oleh Badan Lingkungan Hidup kota Surabaya berdasarkan informasi dan data yang diperoleh.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang pengawasan terhadap sebuah kebijakan dan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan penulis dalam aplikasi dan teori pengawasan. Sehingga dapat menjadi bekal saat penulis terjun secara langsung ke dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait topic penelitian penulis dan merupakan sumbangan pemikiran bagi kampus UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai wujud terima kasih penulis selama menempuh pendidikan sarjana.

3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan referensi perpustakaan bagi mahasiswa yang mengkaji tentang pengawasan suatu kebijakan.